

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah wajib menyajikan laporan keuangan dengan berkualitas. Dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan tersebut bersifat relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Keuangan Pemerintah. Hal ini juga didukung penelitian Hamonangan Siallagan (2020:214), **“Kualitas laporan keuangan merupakan satu taraf pertanggungjawaban pengelolaan keuangan menjadi bentuk informasi yang memiliki relevansi, keandalan, memiliki keterbandingan dan mudah dimengerti mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode.”**¹ Oleh karena itu dengan menerapkan kriteria tersebut maka pemerintah akan mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan pemerintah merupakan media informasi penting yang harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintah yang

¹ Hamonangan Siallagan, **pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Pemanfaatan Teknologi dan kompetensi Bidang akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi Empiris Pada Kota Medan**, Universitas HKBP Nommensen, Vol.14, No.2, Sumatera Utara, 2020, hal. 214

telah ditetapkan. Hal ini sependapat dengan Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa **“Instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan.”**² Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 .

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yang menggunakan laporan keuangan pemerintahan terdiri dari empat kelompok yaitu: masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa. Untuk itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyajikan dan melaporkan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Dikatan bermanfaat jika informasi tersebut dapat membantu dan mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu laporan keuangan haruslah berkualitas sehingga bermanfaat untuk para pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) selaku auditor pemerintah. BPK memberikan empat jenis opini terhadap pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP),

² Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, ANDI, Yogyakarta, 2002

Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas pengendalian internal, setelah itu laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada DPRD/DPRD.

Tabel 1.1
Perkembangan Opini Audit LKPD Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2014-2020

No	Tahun	Opini Audit
1	2014	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2	2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3	2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
5	2019	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
6	2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

(Sumber : www.bpk.go.id)

Berdasarkan tabel diatas Kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan dikatakan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari dari opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan untuk tahun 2014-2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan mendapatkan opini WTP dari BPK dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan sudah berkualitas dan disajikan secara wajar. Namun pada

pelaksanaannya di lapangan masih ditemukan kekurangan dalam penyajian laporan keuangan, misalnya masih sering terjadi keterlambatan dalam penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kurang optimalnya verifikasi keuangan yang efektif, sehingga perlu dipertanyakan bagaimana bisa kualitas laporan keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan opini audit dengan capaian WTP selama enam tahun berturut-turut.

Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Penerapan Standar Akuntansi karena laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan pedoman dan aturan-aturan yang terdapat dalam akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) haruslah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan. Standar Akuntansi Pemerintahan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan sistem dan informasi yang termuat sudah sesuai. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Rhido Baharsyah (2019) menemukan bahwa secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antar penyusun, pengguna dan auditor. Pemerintah pusat maupun daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan. Dan untuk auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit. Oleh karena itu, setiap bagian yang berkepentingan

terhadap laporan keuangan harus memahami Standar Akuntansi Pemerintahan. Maka, dapat disimpulkan bahwa Peneraan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian Nilam (2016) yang menyimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Laporan keuangan pemerintahan yang berkualitas merupakan produk yang harus dihasilkan oleh pemerintah yang dengan bantuan dari bidang atau bagian keuangan. Untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerintahan, akuntansi keuangan daerah dan juga organisasional pemerintahan. Menurut Hamonangan Siallagan **“Individu yang berlatar belakang keuangan akan lebih berkompten dalam melaksanakan fungsi akuntansi dibandingkan individu dengan latar belakang berbeda dari keuangan.”**³ Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Hal ini berlaku di setiap pekerjaan, begitu juga di bagian pemerintahan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami tugasnya dan juga berkompeten. Hal ini dapat dilihat dalam

³ Hamonangan Siallagan, **pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Pemanfaatan Teknologi dan kompetensi Bidang akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi Empiris Pada Kota Medan**, Universitas HKBP Nommensen, Vol.14, No.2, Sumatera Utara, 2020, hal. 216

penelitian Ridho Baharsyah (2019) yang menemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. .

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membahas bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan dengan judul “ **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusiain Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Humbang Hasundutan) .**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah komptensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kulitas laporan keuangan daerah?
3. Apakah penerapan standar akuntansi,kompetensi sumber daya manusia, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari yang dapat diperoleh dari penulisan penelitian ini adalah:

a) Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah serta mampu memahami perbandingan konsep antara materi yang didapatkan saat perkuliahan dengan penerapan langsung di lapangan.

b) Bagi Instansi

Sebagai masukan kepada OPD dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan dan mengembangkan instansi di masa yang akan datang.

c) Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk dapat dikembangkan serta sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu entitas yang terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dalam pelaporan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut (Hanif, 2017). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.1 paragraf 9 sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa **“Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.”**⁴

Dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 ditetapkan bahwa pihak yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan disebut entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas yang menurut perattn perundang-undangan wajib melakukan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum,yang terdiri atas :

1. Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**, 2010

3. Masing- masing Kementrian Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat.
4. Satuan Organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang- undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan tersebut akan dikumpulkan oleh entitas pelapor yang disebut dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah (SKPKD) kedalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.2 Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan,dikatakan bahwa **“Karakteristik laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya”**⁵

Ada empat karakteristik normatif yang diperlukan supaya laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan berkualitas. Keempat karakteristik tersebut antara lain:

1 Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang ada didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu

⁵ Ibid

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi yang ada dimasa lalu.

Ciri-ciri informasi yang relevan yaitu:

- a) Memiliki umpan balik (feed back), yaitu informasi yang ada dalam laporan dapat mengoreksi ekspektasi para penggunanya dimasa lalu.
- b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value), yaitu informasi yang terkandung didalam laporan keuangan pemerintah tersebut dapat digunakan sebagai dasar meramalkan atau memprediksi masa yang akan datang.
- c) Tepat waktu, yaitu laporan keuangan disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap, yaitu informasi yang disajikan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

2 Andal

Infomasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta dapat diverifikasi. Ciri-ciri informasi yang andal antara lain:

- a) Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya di sajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b) Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c) Netralis, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- 3 Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan dengan cara internal dan eksternal. Perbandingan internal dapat dilakukan jika suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan jika entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari periode sebelumnya, maka perubahan tersebut diungkapkan pada periode berikutnya.

4 Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas para pengguna. Oleh sebab itu pengguna disumsikan

memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta pengguna memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan APBD tiap kepala OPD selaku pengguna anggaran penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya. Pencatatan akuntansi tersebut sebagai bahan dalam menyiapkan laporan keuangan OPD. Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan yang disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (KPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 komponen laporan keuangan pemerintah terdiri atas tujuh laporan yang terbagi dalam pelaksanaan pelaporan anggaran yaitu:

1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi, pemakaian sumber daya alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan anggaran dan realisasi dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) bertujuan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat pada LP-SAL dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik dalam pemerintah pusat maupun daerah tidak memiliki perbedaan.

3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening.

4 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari laporan operasional, beban, transfer dan pos-pos luar biasa.

5 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyaikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit laporan operasional ada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan laporan keuangan.

7 Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, LP-SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk di ungkapkan didalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang dibutuhkan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah no. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tujuan umum laporan keuangan ialah untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan,realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang berguna bagi para pengguna dalam membuat serta mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang di hasilkan dari dan unuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Menurut Erlina *et al* (2017:19) mengemukakan bahwa **“Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumberdaya ekomomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menemukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.”**⁶

Dalam Kerangka Konsptual Peraturan Pemeintah No.71 Tahun 2010, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna ntuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

⁶ Erlina *et al*, **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual**, cetakan ketiga, Salemba Empat, Jakarta,2017, hal.19

Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah:

- a) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- d) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah;
- f) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan serta, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

2.1.5 Fungsi Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71. Tahun 2010 laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan setiap entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber yang ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, untuk membantu menemukan ketaatannya peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang di percayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Memebantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas sehingga memudahkan fungsi pelaksanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh atas aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang yang dialokasikan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang di rencanakan.

Setelah memahami betapa pentingnya tujuan dan fungsi laporan keuangan yang telah di uraikan, maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kualitas aparat pemerintah yang melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sumber Daya Manusia penting untuk di tingkatkan karena faktor tersebut dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan demikian faktor tersebut dapat membantu

pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.1.6 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, indikator kualitas laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang ada didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi yang ada dimasa lalu.

Ciri-ciri informasi yang relevan yaitu:

- a) Memiliki umpan balik (feed back), yaitu informasi yang ada dalam laporan dapat mengoreksi ekspektasi para penggunanya dimasa lalu.
- b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value), yaitu informasi yang terkandung didalam laporan keuangan pemerintah tersebut dapat digunakan sebagai dasar meramalkan atau memprediksi masa yang akan datang.
- c) Tepat waktu, yaitu laporan keuangan disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap, yaitu informasi yang disajikan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan

keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah

2 Andal

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta dapat diverifikasi. Ciri-ciri informasi yang andal antara lain:

- a) Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c) Netralis, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3 Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan dengan cara internal dan eksternal. Perbandingan internal dapat dilakukan jika suatu entitas menerakan

kebijakan akuntansi yang samadari tahun ketahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan jika entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi ang sama. Apabilaentitas pemerintsh menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari periode sebelumnya, makan perubahan tersebut diungkapkan pada periode berikutnya.

4 Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinytakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas para pengguna. Oleh sebab itu pengguna disumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta penggun memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Halim dan Kusufi (2014:263) menyatakan bahwa **“Standar akuntansi merupakan pedoman dan prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaa akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada pengguna laporan keuangan.”**⁷ Jika standar akuntansi yang memadai tidak ada maka maka akan menimbulkan implikasi yang negatif, yaitu rendahnya reabilitas dan objektifitas suatu informasi ya ng disajikan, inkonsistensi dalam pelssssaran keuangan serta dapat menyulitkan dalam proses pengauditan.

⁷ Halim dan Kusufi, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta,2014, hal. 263

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya standar ini maka laporan keuangan harus didasarkan pada standar ini sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menghasilkan informasi yang jelas dan dapat diandalkan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun dengan mengacu pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- a) Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010
- b) Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas menuju Akrua
- c) Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
- d) Lampiran II Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan dasar pencatatan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang tidak dibuat berdasarkan SAP hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya SAP, pencatatan laporan keuangan akan menjadi transparan dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

2.2.2 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dilingkup pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah dan unit kerja yang ada didalamnya. Penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini mampu dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dipemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Hal ini berarti informasi keuangan pemerintahan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dipemerintahan dan juga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Fakhurazi (2010), manfaat yang diperoleh dari penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya ialah sebagai keseimbangan antargenerasi

dimana dapat memberikn informasi mengenai kecukupan pemnerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi selanjutnya juga akan menampung pengeluaran tersebut. Laporan keuangan dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

2.2.3 Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi SAP yang berbasis akrual.
2. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.

Menurut Bastian (2010:137) mengemukakan beberapa indikator standar akuntansi pemerintahan antara lain sebagai berikut:

1. Regulasi,
2. Sumber daya manusia,
3. Sistem dan sarana pendukung

Dalam penelitian ini indikator penerapan standar pemerintahan yang digunakan adalah indikator berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.3.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah modal utama dan kekayaan yang paling penting dalam dalam setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting dan mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga dan kemampuan benar-benar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan organisasi maupun kepentingan individual. Menurut Mangkunegara (2012:40), **“Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya.”**⁸

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan, apabila tidak berlandaskan kompetensi yang memadai, maka seseorang tidak akan mampu untuk mencapai kinerja yang baik dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitas, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem dalam melakukan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan dapat dilakukan dengan baik dan cepat. Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan akuntansi, seing mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem

⁸ Mangkunegara, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Bumi Akasara, Jakarta, 2012, hal. 40

akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia di pemerintahan daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.⁹

Kemampuan seorang pegawai yang mengelola keuangan untuk mengolah suatu informasi akuntansi dan kemudian menyusun informasi tersebut kedalam bentuk laporan keuangan yang di susun sesuai dengan standar yang telah di tetapkan pemerintah. Orang yang memahami akuntansi ialah orang yang memiliki kepandaian dan mengerti betul tentang proses akuntansi dilakukan sampai menjadi laporan keuangan yang benar dan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

Pengelolaan keuangan yang baik harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan yang baik dan sesuai dengan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyaipengalaman dibidang keangan. Sehingga untuk menerapkan standar akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia dipemerintahan daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada

⁹ Syarifah Hannum, **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Padang Lawas)**, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis USU, Medan, 2018

kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

2.3.2 Manfaat Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sutrisno (2012:208) mengemukakan berbagai alasan penggunaan kompetensi sumber daya manusia didalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai.

Dalam hal ini kompetensi akan mampu menjawab peranyaan mendasar, keteampilan, pengetahuan dan karakteristik apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan dan perilaku apa saja yang berpengaruh langsung dengan prestasi kerja. Kedua hal tersebut akan membantu dalam mengurangi pengambilan keputusan secara subjektif dalam bidang sumber daya manusia.

2. Alat Seleksi Karyawan

Penggunaan kompetensi standar sebagai alat seleksi dapat membantu organisasi untuk memilih calon karyawan yang terbaik. Caranya yaitu dengan mengembangkan suatu perilaku yang dibutuhkan untuk setiap fungsi jabatan sertamemfokuskan wawancara seleksi pada perilaku yang dicari.

3. Memaksimalkan Produktivitas

Tuntutan untuk menjadikan suatu organisasi “ramping” mengharuskan organisasi untuk mencari karyawan yang dapat dikembangkan secara

terarah untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilannya sehingga mampu untuk dimobilisasikan secara vertikal maupun horizontal.

4. Dasar untuk Pengembangan Sistem Remunerasi.

Kompetensi dapat digunakan untuk mengembangkan remunerasi (imbalan) yang akan dianggap lebih adil. Kebijakan ini akan lebih terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan dengan satu set perilaku yang diharapkan untuk ditampilkan oleh individu.

5. Memudahkan Adaptasi

Dalam era perubahan yang sangat cepat, sifat dari suatu pekerjaan juga sangat cepat berubah dan kebutuhan akan kemampuan baru terus meningkat. Kompetensi memberikan sarana untuk menetapkan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah.

6. Menyelaraskan Perilaku Kerja dengan Nilai-nilai Organisasi.

Kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja individu.¹⁰

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Michael Zwell sebagaimana yang telah dikutip oleh Wibowo menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecakapan kompetensi sumber daya manusia, yaitu antara lain:

¹⁰ Sutrisno, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Kencana, Jakarta, 2012, hal.208

1. Keyakinan dan Nilai-nilai

Keyakinan terhadap dirinya maupun orang lain akan sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Apabila tidak kreatif dan inovatif, seseorang akan tidak memiliki usaha untuk berfikir tentang cara baru atau hal yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Setiap orang harus berfikir positif terhadap dirinya maupun orang lain.

2. Keterampilan

Keterampilan merupakan prasyarat penting dalam kompetensi sumber daya manusia. Berbicara di depan umum dan menulis adalah kompetensi yang sangat penting untuk diperbaiki. Dengan memperbaiki keterampilan berbicara di depan umum dan menulis, kecakapan individu akan meningkat dalam kompetensi tentang perhatian terhadap komunikasi. Pengembangan keterampilan secara spesifik yang berkaitan dengan kompetensi akan memiliki dampak yang baik terhadap individu dan juga organisasi.

3. Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi adalah memiliki pengalaman mengorganisasikan. Individu yang tidak memiliki pengalaman berorganisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasi untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan.

4. Karakteristik Kepribadian

Dalam kepribadian banyak faktor yang diantaranya sulit berubah. Namun, kepribadian bukanlah suatu yang tidak dapat dirubah. Pada kenyataannya, kepribadian seseorang akan berubah seiring bejalannya waktu dan juga pengaruh dari lingkungan. Kepribadian dapat mempengaruhi keahlian individu dalam sejumlah kompetensi, termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim dan memberikan pengaruh dalam membangun hubungan.

5. Motivasi

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan memberikan dorongan dan apresiasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu, dan memberikan perhatian serta pengakuan individual dari atasan dapat berpengaruh positif terhadap motivasi bawahan.

6. Isu Emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai, atau tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif.

7. Kemampuan Intelektual

Kompetensi bergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis.

8. Budaya Organisasi

Budaya organisasi dapat mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam berbagai kegiatan, misalnya praktik rekrutmen dan seleksi

karyawan, sistem penghargaan, praktik pengambilan keputusan, proses pengorganisasian dan sebagainya.

2.3.4 Komponen Kompetensi Sumber Daya Manusia

Mengelola sumber daya manusia berdasarkan kompetensi diyakini bisa lebih menjamin keberhasilan suatu tujuan. Sebagian besar organisasi memakai kompetensi sebagai dasar dalam memilih individu, mengelola kinerja, pelatihan dan pengembangan, serta pemberian kompensasi. Prihadi (2004:105) menyatakan bahwa **“ Komponen utama kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketampilan dan sikap yang saling terkait mempengaruhi sebagian besar jabatan, berkorelasi dengan kinerja pada jabatan tersebut, dan dapat diukur dengan standar-standar yang dapat diterima , serta dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya pelatihan dan pengembangan.”**¹¹

Menurut Hutapea dan Nuriana ada tiga komponen utama dalam pembentukan kompetensi, yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan adalah komponen utama kompetensi yang mudah diperoleh dan diidentifikasi. Pengetahuan individu menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang diembannya. Individu yang memiliki pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi organisasi.

¹¹ Prihadi, **Assesment Centre: Identifikasi Pengukuran dan Pengembangan Kompetensi**, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004, hal.105

2. Keterampilan (*Skills*)

Salah satu komponen yang dapat mensukseskan pencapaian tujuan adalah keterampilan individu. Bagi individu yang memiliki keterampilan yang baik, maka akan mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Keterampilan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan.

3. Sikap (*Attitude*)

Selain pengetahuan dan keterampilan individu, hal yang perlu diperhatikan juga adalah sikap perilaku individu. Jika individu memiliki sikap yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang diembannya akan dilaksanakan dengan baik.¹²

2.3.5 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Adapun yang menjadi indikator atau Sumber Daya Manusia menurut Hutapea dan Nuriana (2008:78) adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan adalah:

- a) Mengetahui dan memahami pengetahuan di bidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggungjawabnya dalam bekerja.
- b) Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, teknik yang baru dalam perusahaan.

¹² Hutapea dan Nuriana, **Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan Untuk HR dan Organisasi yang Dinamis**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal.78

c) Mengetahui bagaimana menggunakan informasi, peralatan dan teknik yang tepat dan benar.

2. Keterampilan

Keterampilan individu meliputi kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan.

3. Sikap

Seorang individu harus memiliki kemampuan dalam beraktifitas dalam bekerja, adanya semangat kerja yang ringgi dan memiliki kemampuan dalam perencanaan atau pengorganisasian.¹³

2.4 Penelitian Terdahulu

Acuan yang berupa berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai pendukung. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Chyntia Rizka (2016) penelitian tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. Penelitian ini menemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.

¹³ Hutapea dan Nuriana, **Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan Untuk HR dan Organisasi yang Dinamis**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal.78

Nilam (2016) meneliti tentang Penelitian ini menemukan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan SAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

Putriasri Pujanira (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Penelitian ini menemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY.

Jeremia (2018) melakukan penelitian tentang Penelitian ini menemukan hasil bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi.

Windi Nindya (2018) melakukan penelitian tentang Penelitian ini menemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan baik secara parsial maupun simultan.

Syarifah Hannum (2018) melakukan penelitian tentang Penelitian ini menemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Padang Lawas. Namun secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Padang Lawas.

Ridho Baharsyah (2019) melakukan penelitian tentang Penelitian ini menemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi, dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. Secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan, namun Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Khoirul Akhmadi (2019) meneliti tentang Penelitian ini menemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial dan simultan secara signifikan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Rina Sinaga (2019) melakukan penelitian tentang Penelitian ini menemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Samosir dan Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.

Khesya Panggabean (2021) melakukan penelitian tentang Penelitian ini menemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial memiliki

pengaruh yang positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Simalungun. Sementara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun secara simultan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi memiliki pengaruh yang positif Terhadap Kualitas Laporan Kengan Pemerintah Daerah Simalungun.

Tabel 2.1

Review Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Chyntia Rizka (2016) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.	Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel Dependent: Kualitas Laporan Pemerintah Daeh	Penelitian ini menemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2	Nilam (2016) Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Derah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bungo).	Variabel Independen: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Derah	Nilam (2016) Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Derah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bungo).

3	Putriasri Pujanira (2017) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY	<p>Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>Variabel Dependen: Kualiatas Laporan Keuangan Daerah</p>	Penelitian ini menemukan bahwa Penelitian ini menemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY.
4	Jeremia (2018) melakukan penelitin tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Dairi).	<p>Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah</p>	Penelitian ini menemukan hasil bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara pasial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi.

5	Windi Nindya (2018) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan	Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah	Penelitian ini menemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan baik secara parsial maupun simultan
6	Syarifah Hannum (2018) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Padang Lawas	Variabel Independen: Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi, dan Sistem Akuntansi Keuangan Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah	Penelitian ini menemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Padang Lawas. Namun secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Padang Lawas.
7	Ridho Baharsyah (2019) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem	Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem	Penelitian ini menemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia,

	Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Kota Medan).	Pengendalian Intern Variabel Independen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi, dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. Secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan, namun Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
8	Khoirul Akhmadi (2019) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Padang Lawas)	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Penelitian ini menemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas

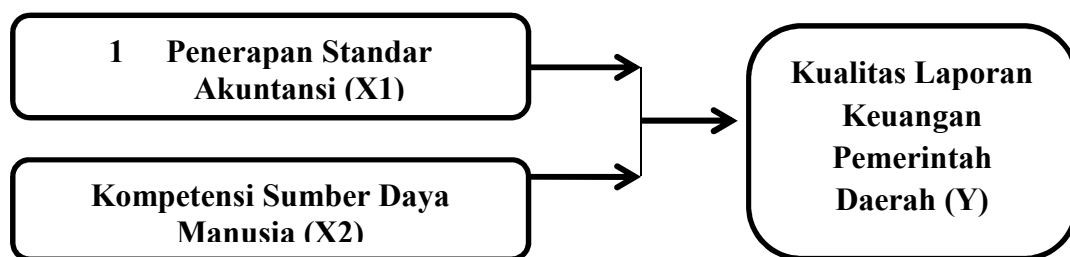
9	<p>Rina Sinaga (2019) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Komite Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Samosir</p>	<p>Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Komite Organisasi</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Samosir dan Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.</p>
10	<p>Khesya Panggabean (2021) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informso, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun</p>	<p>Variabel Independen: Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informso, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial dan simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Simalungun. Sementara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun secara simultan Penerapan Standar Akuntansi memiliki pengaruh yang positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Simalungun.</p>

2.5 Kerangka Konseptual dan Hipotesis

2.5.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibuat untuk menunjukkan hubungan pengaruh setiap variabel dalam suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan review penelitian terdahulu, kerangka konseptual digambarkan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1



Berikut merupakan uraian konsep variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa standar akuntansi merupakan landasan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “**Standar Akuntansi Pemerintahan,selanjutnya disebut SAP,adalah prinsip-prinsip**

akuntansi yang ditrapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.”¹⁴

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antar penyusun, pengguna dan auditor. Pemerintah pusat mauun daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan. Dan untuk auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit. Oleh karena itu, setiap bagian yang berkepentingan terhadap laporan keuangan harus memahami Standar Akuntansi Pemerintah. Maka, dapat disimpulkan bahwa Peneraan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan sangat jelas memiliki pengaruh sesuai dengan teori yang telah di paparkan. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang wajib dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penelitian Nilam (2016) menyimpulkan bahwa Penerapan SAP memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemeintah Daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rhido Baharsyah menemukan bahwa secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah namun secara simultan

¹⁴ Op.cit

berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Hamonangan Siallagan “**Kompetensi sumber daya manusia yang unggul tentunya memiliki pengetahuan yang tinggi, pemahaman, keterampilan maupun pengalaman yang baik dalam bidang maupun dalam satu bidang.**”¹⁵ Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki kecakapan serta pengetahuan dalam mengelola informasi akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak berkompeten serta tidak memiliki keterampilan maka, laporan keuangan tidak bernilai dalam fungsinya mengambil keputusan.

Jika kompetensi sumber daya manusia dalam instansi sudah baik maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi indikator atau karakteristik kualitatif laporan keuangan. Jadi dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat diketahui apakah suatu pemerintahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional,efisie, dan efektif, sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas laporan

¹⁵ Hamonangan Siallagan **Loc.Cit**

keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Akhmadi (2019) menyimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam penelitian Rina Sinaga ditemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia secara Parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah namun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.5.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah digambarkan hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara parsial atau simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara Parsial atau simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Penerapan Standar Akuntansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (yang di pengaruhi). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan pengaruh Penerapan Standar Akuntansi , Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pemahaman Akuntansi sebagai variabel independen terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Dr. Siswijo dalam buku Mardalis (2010:54) mengemukakan bahwa **“Populasi adalah sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria yang ditentukan peneliti.”**

¹⁶Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah OPD yang ada pada Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari 24 OPD Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.2.2 Sampel

Sugiyono (2012:116) mengemukakan bahwa **“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.”**¹⁷

Mengacu pada definisi tersebut maka pengambilan sampel dapat digunakan dengan cara random, sebagian, dan dengan sensus yaitu keseluruhan populasi di ambil sebagai objek penelitian (total sampling). Menurut Sugiyono (2012:122) mengatakan bahwa **“Sampling Purposive**

¹⁶ Mardalis, **Metode Penelitian: Suatu: Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Keduabelas, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal.54

¹⁷ Sugiyono, **Metode Peneliian Pendekatan Bisnis: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&O**, Edisi Ketujuh, Cetakan Keenam belas, Alfa Beta, Bandung, 2012, hal.116

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”¹⁸ Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah bagian yang berhubungan dengan keuangan.

Tabel 3.1

Populasi dan Sampel Penelitian OPD Pemerintahan Humbang Hasundutan

No	Badan/Dinas/Kantor
1	Sekretariat DPRD
2	Inspektorat
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8	Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga
9	Dinas Komunikasi dan Informaika
10	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja
11	Dinas Pendidikan
12	Dinas Lingkungan Hidup
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan Dan Anak
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Dinas Perhubungan
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Dinas Peternakan dan Perikanan
20	Dinas Sosial
21	RSUD Doloksanggul
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
23	Dinas Kesehatan dan P2KB
24	SATUAN Pol-PP

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Humbang Hasundutan

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi:

¹⁸ *Ibid*, hal.122

- 1) Data kuantitatif, berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan dalam kuisisioner.
- 2) Data kualitatif, yaitu data atau informasi baik lisan atau tulisan yang diperoleh dari studi pustaka, karangan ilmiah dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik orang yang ditetapkan atau kondisi riil yang diperoleh langsung dari sumber penelitian dengan melakukan wawancara maupun kuisisioner.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.
- 2) Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
- 3) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap dokumen dan beberapa literatur yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan melalui riset kepustakaan dan jurnal yang telah dipublikasikan serta laporan lain yang dapat mendukung penelitian ini.

3.5 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Defenisi isi operasional variabel merupakan proses penentuan batasan yang menjelaskan ciri dan fisik yang lebih substantif pada suatu konsep. Dengan tujuan supaya penelitian dapat mencapai suatu pengukuran yang sesuai dengan dasar variabel yang telah didefenisikan

konsepnya, maka penelitian tersebut memasukkan konsep proses atau operasional sebagai alat ukur yang digunakan untuk kualifikasi gejala dan variabel yang di teliti.

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Devenisi Operasional	Indikator	Skala
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)	Ukuran-ukuran yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga daat memenuhi tujuannya (PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. 3. Andal 4. 5. Dapat dibandingkan 6. 7. Dapat dipahami (PP No.71 Tahun 2010)	Interval
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	Penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan dalam rangka menciptakan transparansi keuangan pemerintah dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi SAP yang berbasis akrual. 2. 3. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya. 4. (PP No.71 Tahun 2010) 	Interval

Kompetenai Sumber Daya Manusia (X2)	Kemampuan atau karakteristik yang dimiliki seseorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. (Keputusan Kepala BKN No.64A Tahun 2007).	1. Pengetahuan 2. 3. Keterampilan 4. 5. Sikap	Interval
-------------------------------------	---	---	----------

3.5.1 Variabel Dependen

Menurut Jadongan (2014) **“Variabel dependen merupakan variabel yang dijelaskan atau dipegaruhi oleh variabel independen .”**¹⁹

Variabel dependen dilambangkan dengan (Y). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.5.2 Variabel Independen

Menurut Jadongan (2014) **“Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau yang mempengaruhi variabel lain.”**²⁰

Dalam penelitian ini variabel independennya adalah Penerapan, Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemahaman Akuntansi.

3.6 Metode Analisis Data

¹⁹ Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akunansi**, Universitas HKBP Nommensen, Medan 2014, Hal. 43

²⁰ **Ibid**

Adapun jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian kualitas data, analisis statistik dekriptif, asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan uji simultan (uji-F), uji parsial (uji-t) dan uji koefisien determinasi (R^2)

3.6.1 Uji Kualitas Data

3.6.1.1 Uji Validitas

Menurut Iqbal Hasan (2009:15) **“Validitas berarti kesucian alatukur dengan apa yang hendak di ukur, artinya alat ukur yang digunakan dalam pengukurann dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur.”**²¹

Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah melakukan penelitian adalah data yang valid berdasarkan alat ukur yang digunakan (kuisisioner). Metode yang digunakan adalah membandingkan nilai korelasi atau r hitung dari variabel penelitian dengan nilai r tabel. Kriteria dalam menentukan validitas adalah sebagai berikut:

- a) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan valid.
- b) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas pengukuran dibuktikan dengan konsistensi. Menurut Iqbal Hasan (2009:15) **“Reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya.”**²²

Reliabilitas dilakukan untuk membuktikan alat ukur yang digunakan yaitu kuisisioner menunjukkan konsistensi dalam mengukur gejala yang sama. Pertanyaan yang dinyatakan valid dalam uji validitas, maka akan ditentukan reliabilitasnya dengan melihat nilai Cronbach's Alpha. Menurut Dwi Priyatno (2014:64) **“Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik**

²¹ Iqbal Hasan, **Analisis Data: Dengan Statistik**, Cetakan Keempat, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal.15

²² **Ibid**, hal.15

seangkan diatas 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.”²³ Dalam melakukan pengukuran ini digunakan alat ukur berupa program komputer yaitu SPSS.

3.6.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan kegiatan menyimpulkan data mentah dalam jumlah yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan. Informasi yang dapat diperoleh dari statistik deskriptif adalah ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya terdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Menurut Erlina (2008:154) **“Uji normalitas berguna sebagai tahap awal dalam metode analisis data.”**²⁴ Cara yang digunakan untuk melihat apakah data normal atau tidak dapat digunakan dengan metode gambar normal *Probability Plots* dalam program SPSS. Dasar pengumpulan keputusan yang dilakukan yaitu:

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi kuat, maka telah terjadi

²³ Duwi Priyatno, **SPSS22: Pengolahan Data Terraktis**, Edisi Terbaru, Jakarta, 2014, hal.64

²⁴ Erlina, **Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen**, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, USU Press, Medan, 2008, hal. 154

multikolinieritas yang harus diatasi. Model uji regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas.

Mengukur multikolinieritas dapat diketahui dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari model penelitian. Jika nilai VIF lebih kecil dari 5 dan nilai tolerance di atas 0.1 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan karena variabel dependen yang dicari dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel independen. Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a: Konstanta

b: Koefisien Regresi Berganda

X1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

X2: Kompetensi Sumber Daya Manusia

X3: Pemahaman Akuntansi

e: Standar error

3.6.5 Uji Hipotesis

Menurut Iqbal Hasan, “**Pengujian hipotesis adalah satu prosedur yang akan menghasilkan satu keputusan, yaitu keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis tersebut.**”²⁵

3.6.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

²⁵ Iqbal Hasan, *Op.Cit*, hal. 31

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama dengan variabel dependen. Menurut SPSS 17 bahwa **“Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen.”**²⁶

Kriteria pengujiannya adalah:

H_0 : $b_1, b_2, b_3 = 0$, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a : $b_1, b_2, b_3 \neq 0$, artinya secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

H_0 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $sig < \alpha = 5\%$

H_a tidak dapat diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan $sig > \alpha = 5\%$.

3.6.5.2 Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Menurut SPSS 17 bahwa **“Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap pengaruh variabel dependen dengan menggunakan variabel lain bersifat konstan.”**²⁷

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen

Kriteria pengujian ini adalah:

²⁶ Christianus, **Belajar Kilat: SPSS 17, Edisi Pertama**, ANDI, Yogyakarta, 2010, hal.148

²⁷ **Ibid**

$H_0: b_1=0$,artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a: b_1 \neq 0$,artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusannya adalah:

H_0 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig < \alpha = 5\%$

H_a tidak dapat diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $sig > \alpha = 5\%$.

3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan dalam mengukur seberapa kemaampual model dalam menginformasikan variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi ini adalah 0 sampai 1. Nilai dari R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan pada variabel-variabel independen untuk menginformasikan variasi pada setiap variabel independen dan memberikan hampir semua informasi yang diperlukan dalam memperoleh variabel independen.